

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era pandemi ini penggunaan teknologi informasi menjadi tidak asing di temui di semua kalangan, baik itu di dunia kerja, pelaku usaha bisnis hingga ke dunia pendidikan pun menerapkan teknologi informasi. Tidak terkecuali dengan dunia kesehatan, dimana di era sebelum pandemi pun sudah menerapkan bahkan pada era pandemi ini dunia kesehatan semakin banyak menerapkan teknologi informasi sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Salah satu contoh upaya tersebut ialah penggunaan teknologi *machine learning* yang dapat mendeteksi gejala COVID-19 dan juga mengukur resiko kemungkinan positif serta untuk merekomendasikan langkah yang tepat dalam penanganan virus tersebut [1].

Selain penggunaan teknologi, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap keberangkatan dan kedatangan sebagai suatu bentuk upaya pemerintah dalam pendeteksian, pencegahan, dan respon terhadap penyakit pada wilayah terjangkau yang ada pada pintu masuk pelabuhan, bandara, serta Pos Lintas Darat Batas Negara (PLDBN) [2]. Hal tersebut menjadikan KKP sebagai harapan utama dalam melaksanaka serta menerapkan kegiatan surveilans pelayanan kesehatan pada setiap pintu masuk negara. Pengertian KKP menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 jo. 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dijelaskan pada Bab I pasal 1 bahwa KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) merupakan sebuah instansi Kementerian Kesehatan dibawah kordinator Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan yang dimana memiliki beberapa tugas diantaranya melaksanakan pencegahan terhadap keluar masuknya penyakit potensial wabah, melakukan pengendalian dampak

kesehatan lingkungan, melakukan pelayanan kesehatan, serta pengamanan terhadap penyakit baru yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi yang ada di wilayah kerja batas negara [3].

Bandara merupakan salah satu wilayah kerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang menjadi pintu masuk awal virus Covid-19, salah satunya Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang merupakan wilayah kerja dari KKP Soekarno Hatta. Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta merupakan bandara berlokasi di Tangerang, Banten yang memiliki luas 18 km² [4]. Bandara ini merupakan salah satu bandara internasional dengan aktivitas penerbangan tersibuk didunia menurut laporan *Airport Traffic* tahun 2019, bandara tersebut mendapat ranking 25 sebagai salah satu bandara tersibuk didunia [5]. Akan tetapi pada April tahun 2020 sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional menyebabkan penurunan jumlah penumpang pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta, namun kemudian menjelang akhir tahun kembali terjadi lonjakan kenaikan jumlah penumpang dipengaruhi oleh naiknya kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada di bandara-bandara dan menurut CNBC Indonesia (2020) adanya stimulus biaya passenger service charge (PSC) oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional guna meringankan biaya perjalanan masyarakat [5].

Oleh karena itu KKP Soekarno-Hatta dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dari kegiatan surveilans guna memantau serta memastikan tidak terjadi lagi penyebaran kasus Covid-19 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dalam melakukan kegiatan surveilans tersebut KKP Soekarno-Hatta melakukan pemantauan terhadap kegiatan penerbangan maskapai-maskapai yang ada di Bandara Soekarno-Hatta kemudian melakukan pencatatan laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan surveilans. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pegawai KKP Soekarno-Hatta yang bertugas di tiap terminal bandara masih menggunakan cara manual yaitu pencatatan menggunakan

kertas dan pulpen yang kemudian akan diketik sehingga menyebabkan sering terjadinya kendala keterlambatan pengumpulan laporan harian dikarenakan terjadi penumpukan laporan yang harus diketik. Oleh karena itu, dilakuka penelitian ini guna menghasilkan output *website* otomatisasi data bagi KKP Soekarno-Hatta dalam pencatatan laporan harian agar lebih efektif serta efisien.

Sehingga untuk menghasilkan website tersebut, sistem yang akan dibangun menggunakan metode RAD. *Rapid Application Development* (RAD) ialah suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek dengan pendekatan *prototyping* yang dirancang guna menciptakan sistem kualitas tinggi serta meminimalisir waktu dan biaya [6]. Alasan penggunaan metode ini dikarenakan siklus didalamnya tergolong lebih singkat dibanding metode pengembangan sistem lainnya sehingga waktu pengerjaan tergolong lebih cepat sehingga memiliki cukup banyak waktu apabila ingin melakukan perbaikan sistem [7].

1.2 Tujuan

Menghasilkan sebuah *website* otomatisasi data laporan harian bagi KKP Soekarno Hatta dengan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) dalam mempermudah dalam pembuatan laporan yang merupakan salah satu kewajiban pegawai KKP Soekarno Hatta.

1.3 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di KKP Soekarno Hatta yang bertempat di Jl. C3 Jl. P1, RT.001/RW.010, Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten. Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan terdapat tugas pokok yang dikerjakan yaitu membuat sebuah website otomatisasi data laporan COVID-19 yang akan digunakan oleh setiap petugas yang menjadi admin di tiap terminal Bandara Soekarno Hatta untuk memberikan laporan harian ke KKP Soekarno Hatta.

1.4 Aspek Umum dan Kelembagaan

1. Sejarah KKP Soekarno Hatta



Gambar 1.1 Logo KKP

Tahun 1949/1950, pemerintah Indonesia mendirikan lima pelabuhan karantina, yaitu pelabuhan karantina kelas I Tanjung Priok dan Sabang, pelabuhan karantina kelas II Surabaya dan Semarang, serta pelabuhan karantina kelas III Cilacap. Pada tahun 1959, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1959 tentang Penyakit Karantina, disusul Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

Kemudian di tahun 1970 dikeluarkan surat keterangan Menteri Kesehatan No. 1025/DD/Menkes untuk mendirikan Dinas Kesehatan Pelabuhan (DKPL) sebanyak 60 DKPL dan Dinas Kesehatan Bandar Udara (DKPU) sebanyak 12 DKPU. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/IV/78, DKPL dan DKPU digabung menjadi Otoritas Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pengembangan teknologi menjadi tanggung jawab Bagian Desnban Kantor Wilayah Kementerian Kesehatan.

2. Visi dan Misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta

Visi:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Bangsa berdaya saing.
6. Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Struktur Organisasi KKP Soekarno Hatta



Gambar 1.2 Struktur Organisasi KKP Soekarno-Hatta

1.5 Metode Penulisan Laporan

Penulisan laporan ini menggunakan dua teknik penulisan laporan yaitu :

1. Observasi

Yaitu mengamati alur kerja pelaporan yang telah digunakan sebelumnya baik itu dimulai dari admin terminal mencatat laporan sampai dengan mengirimkan melalui media *WhatsApp* ke KKP Kelas I Soekarno-Hatta. Proses ini dilakukan selama mengikuti rangkaian kegiatan Prakti Kerja Lapangan.

2. Studi Literatur

Yaitu mencari dan meninjau referensi berupa karya ilmiah jurnal berkaitan dengan tema laporan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Secara singkatnya laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup, aspek dan kelembagaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, profil mitra PKL, cara penulisan laporan serta struktur penulisan.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang analisis pembahasan dari prototype laporan otomatisasi data laporan yang dirancang.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diambil saat membuat laporan Kegiatan PKL serta saran yang ditujukan kepada mitra PKL.